

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020. Sebagai pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2020 dengan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan politik khususnya di wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat NKRI dan meningkatkan kehidupan demokrasi di daerah.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai – nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

Malili, 06 Januari 2021

Kepala Kantor,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR.....	i
---------------------	---

DAFTAR ISI.....	ii
-----------------	----

BAB I PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

1.1 Latar Belakang	1
--------------------------	---

1.2 Dasar Hukum.....	2
----------------------	---

1.3 Fungsi dan Tugas Pokok.....	3
---------------------------------	---

1.4 Struktur Organisasi.....	4
------------------------------	---

1.5 Anggaran.....	10
-------------------	----

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
---	-----------

2.1 Rencana Strategis.....	13
----------------------------	----

2.2 Indikator Kinerja Utama.....	15
----------------------------------	----

2.3 Perjanjian Kinerja.....	16
-----------------------------	----

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
---	-----------

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	17
-------------------------------------	----

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian.....	19
--	----

3.3 Realisasi Anggaran.....	29
-----------------------------	----

BAB IV PENUTUP.....	36
----------------------------	-----------

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Sesuai tugas dan fungsinya adalah Menyelenggarakan urusan dalam bidang Politik serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di masyarakat. Keberadaan kantor ini menjadi sangat strategis karna rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan kondusifitas wilayah saat ini sedang menjadi persoalan yang cukup penting di negeri ini, terutama ketika memasuki tahun – tahun politik menjelang PILKADA 2020. kebhinekaan ras, suku, budaya dan agama menjadikan luwu timur dikenal sebagai Indonesia mini ini merupakan potensi sekaligus tantangan untuk mempertahankan kondusifitas.

Kondisi bangsa Indonesia yang saat ini sedang banyak menghadapi permasalahan sosial mewajibkan penanganan yang serius khususnya dalam hal pencegahannya. Pembangunan karakter bangsa yang banyak dipersoalkan menjadi penyebab terjadinya kesenjangan ini dapat dijawab oleh peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik karena kantor ini merupakan perangkat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang menangani hal – hal yang berkaitan dengan generasi muda dan nasionalisme. Inilah yang menjadikan apa yang dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi sangat penting untuk disinergikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan OPD lain sehingga pembangunan infrastruktur dan SDM di Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan secara komprehensif dan terpadu.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Hegeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pasal 18 ayat (1) yang menerangkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020.
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 58).

1.3 Fungsi dan Tugas Pokok

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

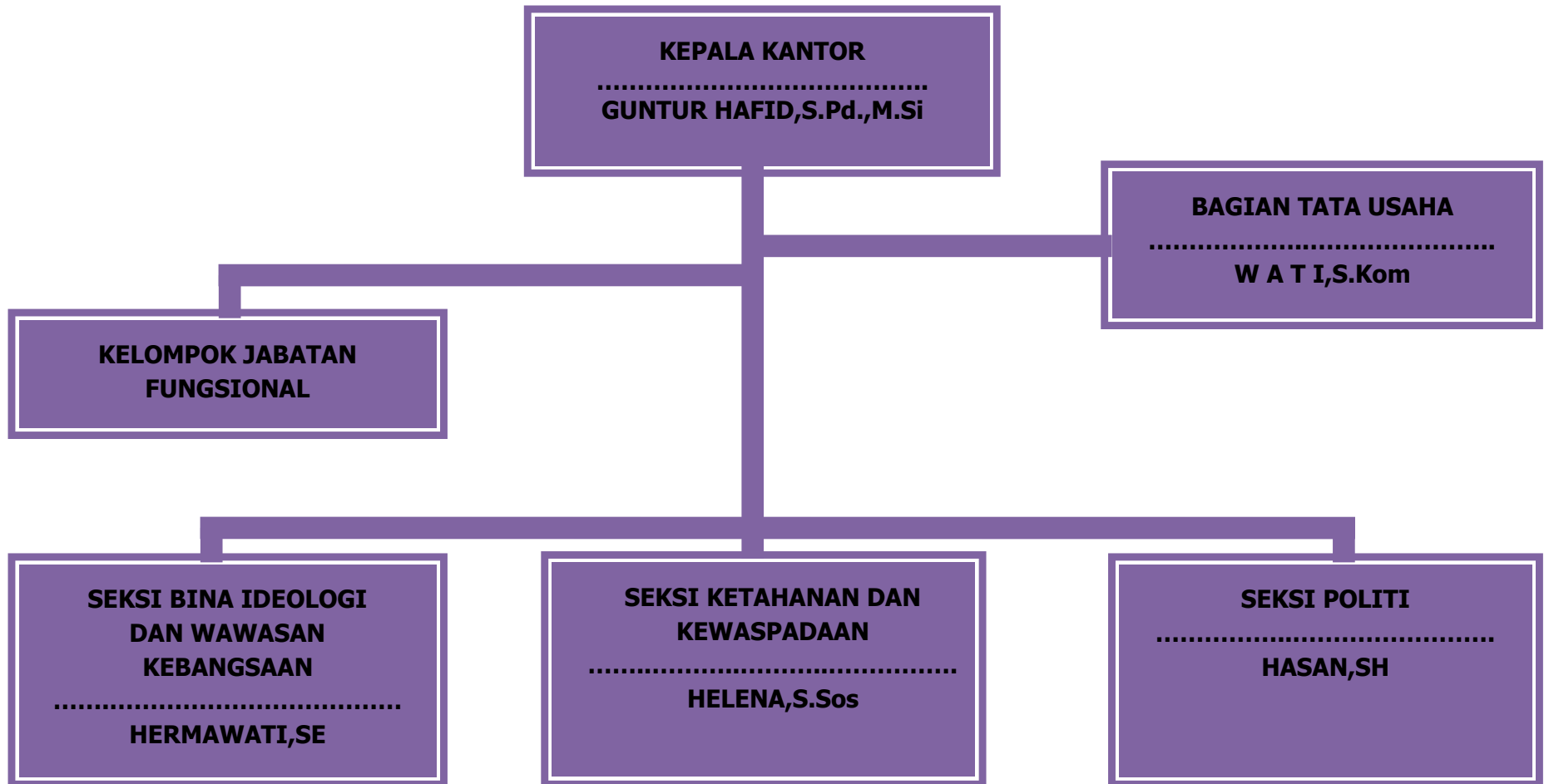
- a. **Fungsi,** Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik, dimana dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan kantor maupun dengan instansi lainnya.
- b. **Tugas,** Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa & Politik mempunyai tugas :
 1. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan, kewaspadaan & bidang politik.
 3. Menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

4. Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
5. Menciptakan kerukunan antar umat beragama di wilayah kabupaten luwu timur.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perpolitikan daerah.
7. Meningkatkan kesadaran Ormas, LSM dalam partisipasi pembangunan di wilayah kabupaten luwu timur.
8. Meningkatkan pengetahuan bagi para pengurus partai politik dalam membuat laporan pertanggungjawaban bantuan dana partai politik.

1.4 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor;
2. Kasubag Tata Usaha;
3. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
4. Seksi Politik;
5. Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1
Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada.

komposisi sumber daya manusia pada akhir tahun 2020 sebanyak 22 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 9 (sembilan) orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 13 orang. Yang terdiri dari PNS laki-laki sebanyak 5 orang, PNS perempuan sebanyak 4 Orang, upah jasa laki-laki sebanyak 4 orang dan upah jasa perempuan sebanyak 9 orang.

Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 1 Orang, S1 sebanyak 16 Orang dan SMA sebanyak 5 Orang sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah PNS

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, Golongan dan jenis Kelamin.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	III	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
3	II	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
4	CPNSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Upah Jasa	-	-	2	7	-	-	2	2	-	-	-	-	4	9

Sumber : Kepegawaian KesbangPol

Tabel 2
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan jenis Kelamin
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021

No	Pejabat Struktural / Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	II a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	III a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	IV a	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
6	IV b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kepegawaian KesbangPol

Tabel 3
Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021

No	Pejabat Struktural / Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kepegawaian KesbangPol

1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, diperlukan sarana berupa sarana dan prasarana kerja sekaligus asset perlengkapan yang dikelola oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun 2020 dimana jumlah gedung kantor sebanyak 1 (satu) Unit terdiri dari ruang Kepala Kantor : 1 Unit, ruang Kasubag Tata Usaha : 1 Unit, ruang Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan : 1 unit, ruang Seksi Politik : 1 Unit, ruang Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan : 1 Unit, ruang Rapat Kantor : 1 Unit, ruang Dapur : 1 Unit, Kamar Kecil : 3 Unit dan ruang tamu (front office) : 1 Unit dimana semuanya dalam kondisi baik, dan jumlah kendaraan dinas / Operasional Mobil sebanyak 1 unit dan Motor sebanyak 3 unit dan semuanya dalam kondisi baik serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terdiri dari Laptop : 10 Unit , Komputer/PC : 3 Unit , AC : 9 Unit, Printer : 9 Unit, dan lain – lain yang sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 4
Daftar Sarana Ruangan Kantor dan Kondisinya
Per 31 Desember 2020

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1 Unit	Kondisi Baik
2.	Ruang Kepala Kantor	1 Unit	Kondisi Baik
3.	Ruang Kasubag Tata Usaha	1 Unit	Kondisi Baik
4.	Ruang Seksi Politik	1 Unit	Kondisi Baik
5.	Ruang Seksi Bina Ideologi & Wasbang	1 Unit	Kondisi Baik
6.	Ruang Seksi Ketahanan & Kewaspadaan	1 Unit	Kondisi Baik
7.	Ruang Rapat Kantor	1 Unit	Kondisi Baik
8.	Kamar Kecil	3 Unit	Kondisi Baik
9.	Ruang Dapur	1 Unit	Kondisi Baik
10.	Ruang Tamu (Front Office)	1 Unit	Kondisi Baik

Tabel 5
Daftar Kendaraan Dinas/Operasional dan Kondisinya
Per 31 Desember 2020

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil	1 Unit	Kondisi Baik
2.	Motor	3 Unit	Kondisi Baik
Jumlah		4 Unit	

Tabel 6
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya
Per 31 Desember 2020

No	Jenis Barang	Keadaan		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Lemari	6	-	6 Unit
2.	White Board	2	-	2 Unit
3.	Meja Rapat	1	-	1 Unit
4.	Meja Komputer	2	-	2 Unit
5.	Meja Kerja	19	-	19 Unit
6.	Kursi Tamu	2	-	2 Unit
7.	Kursi Kerja	6	-	6 Unit
8.	Kursi Rapat	40	-	40 Unit
9.	Kipas Angin	3	-	3 Unit
10.	LCD	1	-	1 Unit
11.	AC	9	-	9 Unit
12.	Dispenser	2	-	2 Unit
13.	Wireles	1	-	1 Unit
14.	Filling Kabinet	8	-	8 Unit
15.	Brankas	1	-	1 Unit
16.	Televisi	2	-	2 Unit
17.	UPS	3	-	3 Unit
18.	Kamera	1	-	1 Unit
19.	Gambar Presiden / Wakil	2	-	2 Unit
20.	Komputer	3	-	3 Unit
21.	Notebook	10	-	10 Unit
22.	Printer	9	-	9 Unit
23.	Hardisk	2	-	2 Unit
24.	Layar LCD	1	-	1 Unit
25.	Kulkas	2	-	2 Unit

1.5 Anggaran

Untuk tahun anggaran 2020 alokasi anggaran belanja pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 3.345.681.135,- dimana belanja tidak langsung sebesar Rp. 870.546.578,- dan belanja langsung sebesar Rp. 2.475.134.557,-. Namun pada awal tahun 2020 Pandemi Covid-19 yang melanda menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan adanya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintahan daerah. Realokasi dan refocusing anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk penanganan tanggap darurat pandemi Covid-19 dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak, yang mengalami refocussing anggaran sebanyak 2 (dua) kali dan Perubahan anggaran pokok sehingga alokasi anggaran perubahan pada tahun 2020 untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 2.062.622.657,- dimana belanja tidak langsung sebesar Rp. 825.055.378,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.237.567.279,- hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Daftar Alokasi Pagu Anggaran
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Ket
1	Total Belanja Tidak Langsung	870.546.578,-	825.055.378,-	
2	Total Belanja Langsung	2.475.134.557,-	1.237.567.279,-	
3	Total Belanja	3.345.681.135,-	2.062.622.657,-	

Tabel 8
Anggaran Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Gaji Pokok PNS	387,952,600,-
2.	Tunjangan Keluarga	41,914,656,-
3.	Tunjangan Jabatan	46,800,000,-
4.	Tunjangan Fungsional Umum	8,270,000,-
5.	Tunjangan Beras	21,415,500,-
6.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,615,304,-
7.	Pembulatan Gaji	6,803,-
8.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	323,751,200,-
Jumlah		832,726,063,-

Tabel 9
Anggaran Belanja Langsung
Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
5.1	Belanja Tidak Langsung	870.546.578	825.055.378
01	Belanja Pegawai	870.546.578	825.055.378
5.2	Belanja Langsung	2,475,134,557	1,237,567,279
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	603,442,057	463,509,529
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,665,000	1,440,000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	37,500,000	28,005,000
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16,515,000	17,515,000
09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19,950,000	9,800,000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13,785,807	14,065,479
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,850,000	14,718,000
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,845,250	2,845,250
15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	6,180,000	6,180,000
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	18,975,000	9,375,000
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	223,730,000	110,575,000
19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	162,000,000	162,000,000
24	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	79,446,000	86,990,800

02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	132,280,000	107,350,250
5	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	19,000,000	-
12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,280,000	60,728,000
22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	30,000,000	29,895,000
24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Operasional	19,000,000	16,727,250
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47,870,000	2,530,000
03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	47,870,000	2,530,000
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	25,000,000	4,930,000
02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	5,000,000	2,510,000
05	Peyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	20,000,000	2,420,000
08	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	10,000,000	4,520,000
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	10,000,000	4,520,000
21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	411,661,500	217,621,500
07	Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Parpol, Ormas, LSM dan OKP	32,112,500	17,942,500
11	Pemantauan Situasi Politik Daerah	34,131,000	18,481,000
13	Rencana Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik	34,821,000	11,038,000
14	Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Partai Politik dan Masyarakat	162,690,000	20,793,000
16	Pelaksanaan Desk Pemilihan Umum	147,907,000	149,367,000
30	Program Pembinaan Kerukunan dan Kesatuan Bangsa	1,244,881,000	437,106,000
01	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	57,809,000	11,054,000
02	Pendidikan Bela Negara	396,040,000	5,372,000
03	Forum Koordinasi Pengawasan Orang Asing serta Pemantauan Orang Asing, NGO & Lembaga Asing	25,014,000	12,754,000
04	Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama	193,589,000	88,524,000
05	Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	43,800,000	29,580,000
06	Penguatan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah	452,372,000	289,822,000
07	Gerakan Nasional Revolusi Mental	76,257,000	-
Total Belanja Tidak Langsung		870.546.578	825.055.378
Total Belanja Langsung		2,475,134,557	1,237,567,279
Total Belanja		3.345.681.135	2.062.622.657

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Untuk mewujudkan daerah Kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya dimasa sekarang dan yang akan datang membutuhkan perencanaan kebijakan yang lebih akurat dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusun Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa & Politik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sbb :

a. Visi

Kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkaitan dengan visi dan misi kesemuanya mengacu pada visi dan misi pemerintah sehingga setiap perangkat daerah tidak memiliki visi dan misi secara tersendiri. Berdasarkan Rencana Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maka telah ditetapkan visi Kabupaten Luwu Timur yang menjadi visi seluruh perangkat daerah yaitu **"Luwu Timur Terkemuka 2021"**.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang harus diwujudkan oleh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan perangkat daerah yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mengampu misi nomor 6 yaitu **"Mendorong Berkembangnya Masyarakat Yang Religius dan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama"** untuk menjaga kesatuan bangsa dan kerukunan umat beragama.

c. Tujuan

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi maka tujuan yang ingin dicapai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah **Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat.**

d. Sasaran

Dalam upaya menuju tercapainya visi, misi dan tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, maka sasaran Kantor Kesatuan Bangsa & Politik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan.
2. Meningkatnya Politik Masyarakat.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD.

e. Strategi dan Kebijakan

Untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menetapkan 3 (tiga) strategi yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan masyarakat yang religius dan toleransi dalam kehidupan beragama, dengan menjalankan beberapa kebijakan yaitu :
 - Peningkatan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.
 - Peningkatan kewaspadaan dalam rangka cegah & tangkal dini terhadap potensi konflik.
 - Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka keamanan & ketertiban masyarakat.
2. Peningkatan sosialisasi dan pemantauan terhadap Ormas/LSM dan Partai Politik, dengan menjalankan beberapa kebijakan yaitu :
 - Melakukan monitoring terhadap Ormas / LSM dan Partai Politik serta pemantauan kegiatan yang dilakukan dan keberadaan kesekretariatan.
3. Melakukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja, dengan menjalankan beberapa kebijakan yaitu :
 - Penerapan proses kegiatan dan program terencana dari tahap proses awal penyusunan sampai dengan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Melakukan monitoring, koordinasi, sinkronisasi, serta mengevaluasi kegiatan dan program yang dilaksanakan.

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Luwu Timur Terkemuka 2021			
Misi 6 : Mendorong Berkembangnya Masyarakat Yang Religius dan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Peningkatan pembinaan masyarakat yang religius dan toleransi dalam kehidupan beragama.	- Peningkatan kerukunan dalam kehidupan beragama & bermasyarakat. - Peningkatan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini terhadap potensi konflik. - Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka keamanan & ketertiban masyarakat.
	Meningkatnya Politik Masyarakat	Peningkatan sosialisasi dan pemantauan terhadap Ormas / LSM dan Partai politik.	- Melakukan monitoring terhadap Ormas / LSM dan Partai Politik serta pemantauan kegiatan yang dilakukan dan keberadaan kesekretariatan.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan SKPD	Melakukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja.	- Penerapan proses kegiatan dan program terencana dari tahap proses awal penyusunan sampai dengan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Melakukan monitoring, koordinasi, sinkronisasi, serta mengevaluasi kegiatan & program yang dilaksanakan.

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur merupakan ikhtisar rencana yang dicapai pada tahun 2020. Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran 2020.

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020
Yang termuat dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	94,74
2.	Meningkatnya Politik Masyarakat	Persentase ORMAS, LSM OKP dan Parpol yang Aktif	96,18
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP	70

2.3 Perjanjian Kerja

Untuk perjanjian kerja sebagai salah satu pendukung dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat dari penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	94,74	Pembinaan Kerukunan dan Kesatuan Bangsa	437.106.000,-
2.	Meningkatnya Politik Masyarakat	Persentase ORMAS, LSM OKP dan Parpol yang Aktif	96,18	Pendidikan Politik Masyarakat	217.621.500,-
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP	70	Pelayanan Administrasi Perkantoran	463.509.529,-
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	107.350.250,-
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.530.000,-
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.930.000,-
				Perencanaan & Penganggaran SKPD	4.520.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2020 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana KesbangPol Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

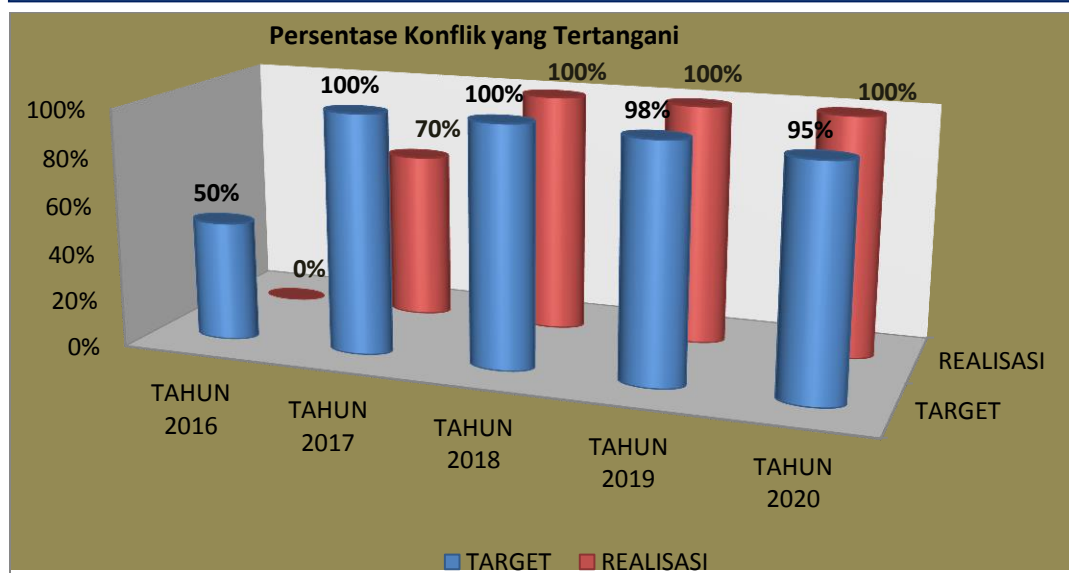
Adapun capaian kinerja Sasaran KesbangPol berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 1
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	94,74	100	106
2.	Meningkatnya Politik Masyarakat	Persentase ORMAS, LSM OKP dan Parpol yang Aktif	96,18	100	104
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan SKPD	Nilai SAKIP	70	-	-

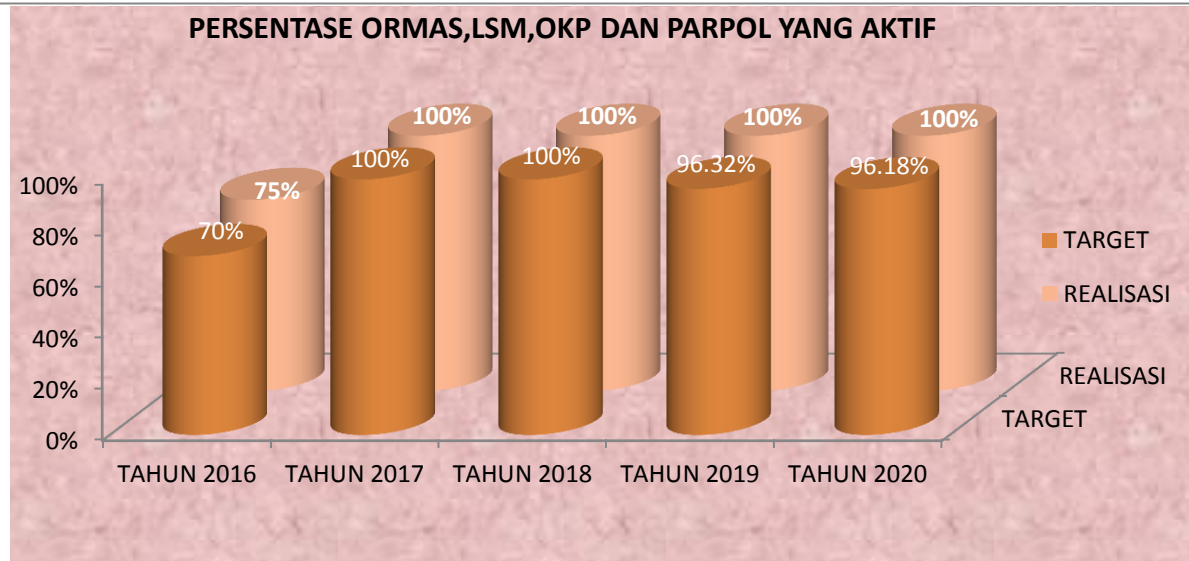
Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan



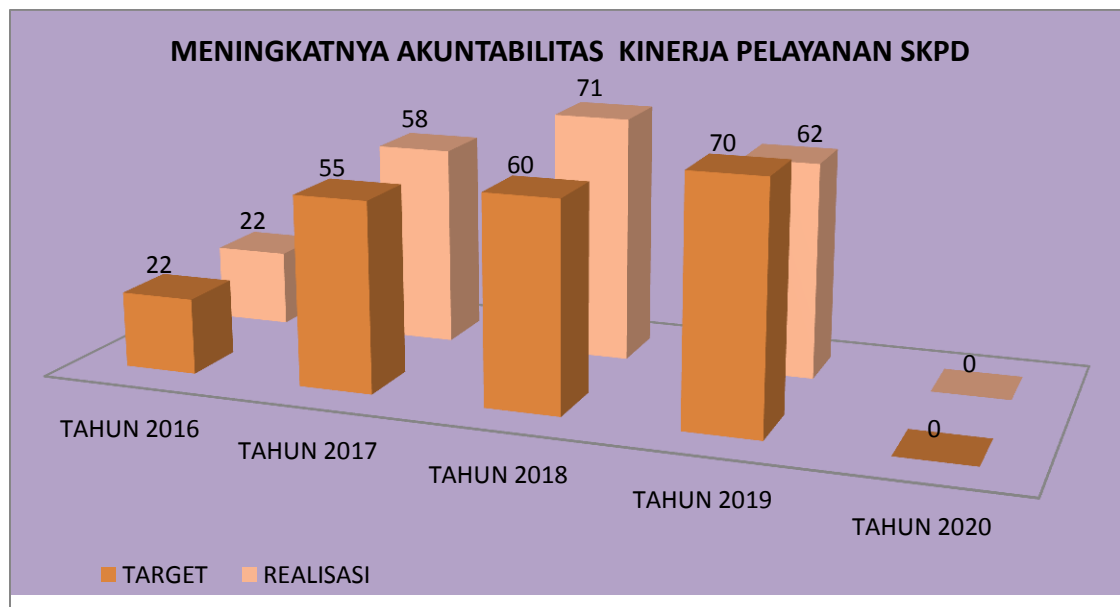
Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Politik Masyarakat



Sasaran Pendukung

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan SKPD



3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian dua sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

SASARAN STRATEGIS 1

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pertama **"Meningkatnya Wawasan Kebangsaan"** tahun 2020 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 2
Capaian Kinerja Sasaran ke - 1

Sasaran I	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan			
	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020		
Indikator Kinerja Sasaran		Target	Realisasi	Capaian
Persentase konflik sosial yang tertangani	102,04	94,74%	100%	106%

1. Analisis Capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2020

- **Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Tertangani (Terjadi)}}{\text{Jumlah Total Konflik Sosial yang Terlaporkan}} \times 100\%$$

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 1 sebagian telah difocussing dan anggarannya dialihkan ke penanganan Covid-19. Sehingga dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pada seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan, namun tetap mengarah ke sasaran tercapainya sasaran 1.

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada tahun 2020 berdasarkan indikator sasaran dalam Renstra 2016-2021 adalah 94,74% dan terealisasi 100%, dengan persentase capaian 106%.

❖ Hambatan/Kendala

Secara keseluruhan target program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis yang pertama ini dapat dilaksanakan dan tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga tidak ada factor serius yang menjadi hambatan / kendala yang mempengaruhi pencapaian pada sasaran ini, walaupun pada tahun 2020 wabah COVID-19 mulai merebak di wilayah Kabupaten Luwu Timur sehingga ada beberapa kegiatan yang mengalami refocusing anggaran tetapi KesbangPol bisa menangani.

❖ Solusi

Pada pelaksanaan program/kegiatan ini terkait permasalahan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik, berkat kerjasama dengan semua unsur terkait.

❖ Efisiensi Anggaran

Refocussing anggaran merupakan salah bentuk dari efisiensi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

❖ Efisiensi Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam melakukan pemantauan dan pendataan di lapangan terkait kasus konflik sosial yang terjadi di wilayah kabupaten luwu timur, namun Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terbantu berkat adanya kerjasama dengan TNI, POLRI, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan serta Tim Informan yang tersebar di wilayah Kecamatan sehingga mempermudah dalam penerimaan laporan di kecamatan.

Tabel. 3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase konflik sosial yang tertangani	94,74 %	100%	106 %	437,106,000,-	426,833,300,-	97,65 %
Program Pembinaan Kerukunan dan Kesatuan Bangsa	Persentase konflik sosial yang ditangani	95%	100%	105%	437,106,000,-	426,833,300,-	97,65 %

Tabel. 4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase konflik sosial yang tertangani	106%	97,65%	2,35%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan wawasan kebangsaan sebesar 106% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,65%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 2,35%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Jadi dalam hal ini tidak ada faktor utama yang mempengaruhi kegagalan dalam pencapaian sasaran ini.

SASARAN STRATEGIS II

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Kedua "**Meningkatnya Politik Masyarakat**" tahun 2020 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke - 2

Sasaran I	Meningkatnya Politik Masyarakat			
Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase ORMAS, LSM, OKP dan Parpol yang aktif	102,04	96,18%	100%	104%

1. Analisis Capaian kinerja Sasaran 2 tahun 2020

- **Persentase Ormas, LSM, OKP dan Parpol yang aktif**

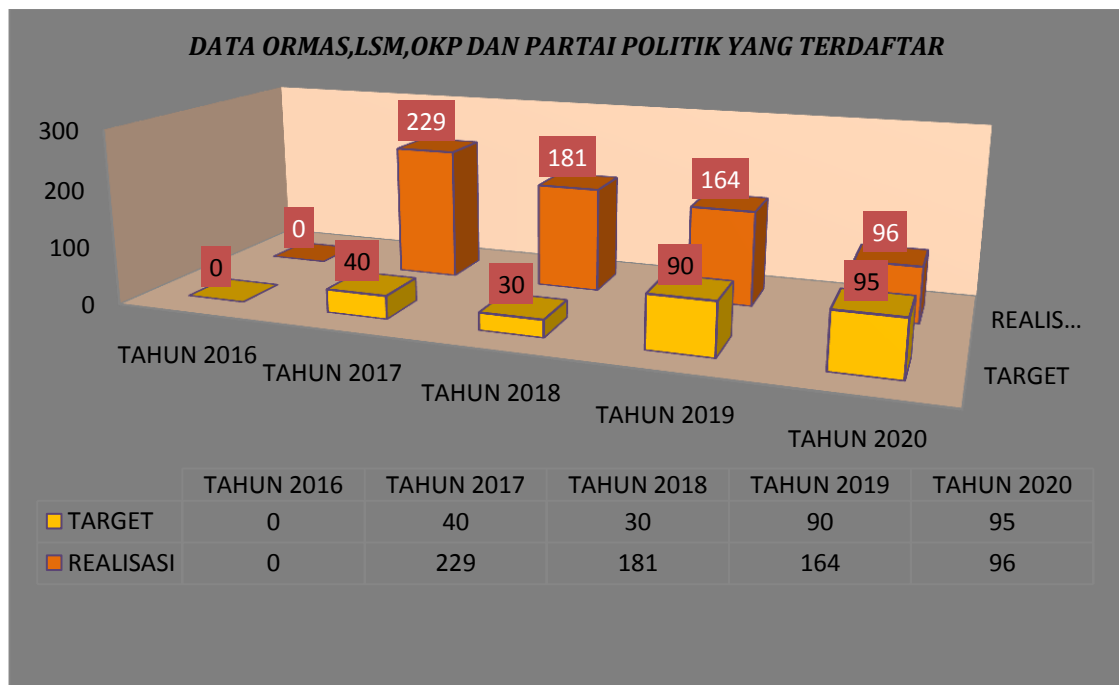
Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Ormas, LSM, OKP \& Parpol yg Aktif}}{\text{Jumlah Total Ormas, LSM, OKP \& Parpol yg Terdaftar}} \times 100\%$$

Target dari indikator tersebut Persentase ORMAS, LSM, OKP dan Parpol yang aktif pada tahun 2020 sebesar 95% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 104%. jumlah Ormas/LSM dan OKP yang terdaftar dan aktif pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2020 sebanyak 96 Unit. Yang terdiri dari : (Mesjid : 26 Unit, Gereja : 12 Unit, Pura : 9 Unit, Kelompok Tani/Nelayan : 40 Unit, Ormas/LSM : 5 Unit, dan Lembaga Pendidikan (Tk/Yayasan : 4 Unit). Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 7
Database Ormas / LSM dan OKP yang Terdaftar
Menurut Kecamatan
Tahun 2020

NO	KECAMATAN	ORMAS/ LSM	OKP	KELOMPOK TANI/ NELAYAN	LEMBAGA PENDIDIKAN (TK & YAYASAN)	MASJID	GEREJA	PURA	KET
1	BURAU	1	0	2	2	3	2	0	10
2	WOTU	0	0	5	0	4	1	0	10
3	TOMONI	0	0	3	0	1	3	0	7
4	MANGKUTANA	1	0	2	0	1	2	0	6
5	TOMONI TIMUR	0	0	1	0	1	0	2	4
6	KALAENA	0	0	0	1	2	0	5	8
7	ANGKONA	0	0	4	0	1	2	0	7
8	MALILI	3	0	8	1	4	0	2	18
9	WASUPONDA	0	0	4	0	1	2	0	7
10	TOWUTI	0	0	9	0	8	0	0	17
11	NUHA	0	0	2	0	0	0	0	2
TOTAL		5	0	40	4	26	12	9	96 unit



Tabel. 8
Jumlah Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD
Periode 2019 -2024

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Nama Anggota DPRD	L/P	Ket
1	GOLKAR	7 Kursi	H. Amran Syam, SH Najamauddin Mahading, S.Sos Hariyanti Harun Badawi Alwi, SE Wahidin Wahid Aripin, S.Ag	L L L P L L L	L : 6 Orang P : 1 Orang
2	NASDEM	4 Kursi	H.Muhammad Siddiq.BM,SH Irmanto Hafid,S.An Tugiat,S.Ag Semuel	L L L L	L : 4 Orang P : -
3	PAN	4 Kursi	Ir.Hj.Harisah Suharjo Masrul Suara Andi Surono,S H.Usman Sadik,S.Sos	P L L L	L : 3 Orang P : 1 Orang
4	PDIP	3 Kursi	Efraem,ST,MM Leonar Bongga, SH Ober Datte	L L L	L : 3 Orang P : -
5	GERINDRA	4 Kursi	I Wayan Suparta Drs.H.M.Sarkawi A. Hamid,M.Si Aris Situmorang,SE Andi Baharuddin,SM	L L L L	L : 4 Orang P : -
6	DEMOKRAT	2 Kursi	Suprianto,SE I Made Sariana,SH	L L	L : 2 Orang P : -
7	HANURA	3 Kursi	Alpian,A.Ma.Pd Rully Heryawan,A,Md Ir. Abd. Munir Razak, MM	L L L	L : 3 Orang P : -
8	PKS	1 Kursi	KH. Suardi Ismail,S.FIL,I.,M.Si	L	L : 1 Orang
9	PKB	1 Kursi	Sunawar Arisal,S.Sos	L	L : 1 Orang
10	PBB	1 Kursi	Abduh,S.Ag	L	L : 1 Orang

Dari data di atas dapat dilihat jumlah Partai Politik yang aktif di wilayah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 10 Partai Politik serta jumlah Anggota Legislatif yang mendapatkan kursi di DPRD sebanyak 30 orang dan untuk keterwakilan perempuan ada 2 orang dan laki – laki 28 orang.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu Program Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- Kegiatan Pemantauan, Pengawasan & Evaluasi Parpol, Ormas, LSM dan OKP
- Kegiatan Pemantauan Situasi Politik Daerah
- Kegiatan Rencana Penggunaan & Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Partai Politik dan Masyarakat
- Kegiatan Pelaksanaan Desk Pemilihan Umum

- Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Persentase ORMAS, LSM, OKP dan Parpol yang aktif, secara keseluruhan tidak ada hambatan/kendala yang cukup besar dalam mempengaruhi pencapaian sasaran. Namun jumlah personil yang masih kurang sehingga dibutuhkan penambahan personil agar memudahkan dalam melakukan pemantauan ke lapangan.

- Solusi

Pada sasaran strategis ini untuk permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian ini untuk tahun 2020 tidak ada kendala yang cukup serius, hanya saja akan melakukan pengusulan permintaan personil dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan ini.

- Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran 2 (dua) dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu:

Terkait Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Partai Politik dan Masyarakat, pada tahun 2020 terjadi pengurangan terhadap pendidikan politik masyarakat yang sedianya dilaksanakan di hotel sikumbang namun adanya refocusing anggaran semua dana untuk kegiatan ini dikeluarkan.

- Efisiensi Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran 2 (dua), maka dalam pelaksanaan program/kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, didukung dengan adanya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum maksimal sehingga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sangat membutuhkan tambahan personil untuk membantu dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Tabel. 9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Politik Masyarakat	Persentase ORMAS, LSM, OKP dan Parpol yang aktif	96,18 %	100%	104%	217,621,500,-	209,686,000,-	96,35%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase ORMAS, LSM, OKP dan Parpol yang aktif	95%	101%	106%	217,621,500,-	209,686,000,-	96,35%

Tabel. 10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Politik Masyarakat	Persentase ORMAS, LSM, OKP dan Parpol yang aktif	104%	96,35%	3,65%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Politik Masyarakat sebesar 104% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,35%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 3,65%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat di hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efiesinesi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

- Kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan terkait pendaftaran Ormas
- Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- Memaksimalkan jumlah personil yang ada dalam pembagian wilayah pemantauan dan pelaksanaan kegiatan.

SASARAN STRATEGIS III

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Ketiga “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD**” tahun 2020 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke - 2

Sasaran I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD			
	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020		
Indikator Kinerja Sasaran		Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	62	70	0	0

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, kami membandingkan antara nilai capaian kinerja tahun 2019 sebesar 62% dan untuk realisasi indikator kinerja pada sasaran yang ketiga ini untuk tahun 2020 masih menunggu hasil evaluasi SAKIP dari Tim Inspektorat Kabupaten.

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam Pencapaian Sasaran :

- Hambatan / Masalah Pelaksanaan Pencapaian Sasaran :

- Strategi / Upaya Pemecahan Masalah :

- Program / Kegiatan yang Mendukung Sasaran Tersebut :
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Tekhnis, Kunjungan Kerja Dalam Daerah.
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun.
 - Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Tabel. 9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD	Nilai SAKIP	70			582,839,779	579,354,742	99.40
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	91%	91%	463,509,529	460,284,242	99.30
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100%	100%	107,350,250	107,090,500	99.76
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Org	1 Org	100%	2,530,000	2,530,000	100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	4,930,000	4,930,000	100.00
Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	4,520,000	4,520,000	100.00

Tabel. 10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD	Nilai SAKIP	0	99.40	99.40
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	91%	99.30	109
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	99.76	99.76
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	100.00	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	100.00	100
Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu	100%	100.00	100

3.3 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBD Perubahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Perubahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, maka besaran pagu anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11
Tabel Data Pengelolaan Keuangan SKPD Tahun 2020

No	Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
	BELANJA			
1	Belanja Langsung	1.237.567.279,-	1.215.874.042,-	98,25
	Belanja Barang dan Jasa	1.176.839.279,-	1.155.146.042,-	98,16
	Belanja Modal	60.728.000,-	60.728.000,-	100
2	Belanja Tidak Langsung	825.055.378,-	824.118.711,-	99,89
	Belanja Pegawai	825.055.378,-	824.118.711,-	99,89
	Total	2.062.622.657,-	2.039.992.753,-	98,90

Sumber : Keuangan KesbangPol

Tabel 12
Realisasi Keuangan

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Permasalahan	Solusi dan Rekomendasi Perbaikan
		Pagu	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/3X100 (%)	(6)	(7)
	Belanja	2.062,622,657	2.039.992.753	98,90		
5.1	Belanja Tidak Langsung	825,055,378	824,118,711	99.89		
	Gaji dan Tunjangan (Tambahan Penghasilan)	825,055,378	824,118,711	99.89	-	-
5.2	Belanja Langsung	1,237,567,279	1,215,874,042	98.25		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	463,509,529	460,284,242	99.30		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,440,000	1,440,000	100.00	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	28,005,000	27,819,250	99.34	-	-
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17,515,000	17,512,500	99.99	-	-
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9,800,000	9,780,000	99.80	-	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,065,479	14,060,048	99.96	-	-
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,718,000	14,479,700	98.38	-	-
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,845,250	2,828,800	99.42	-	-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,180,000	6,120,000	99.03	-	-

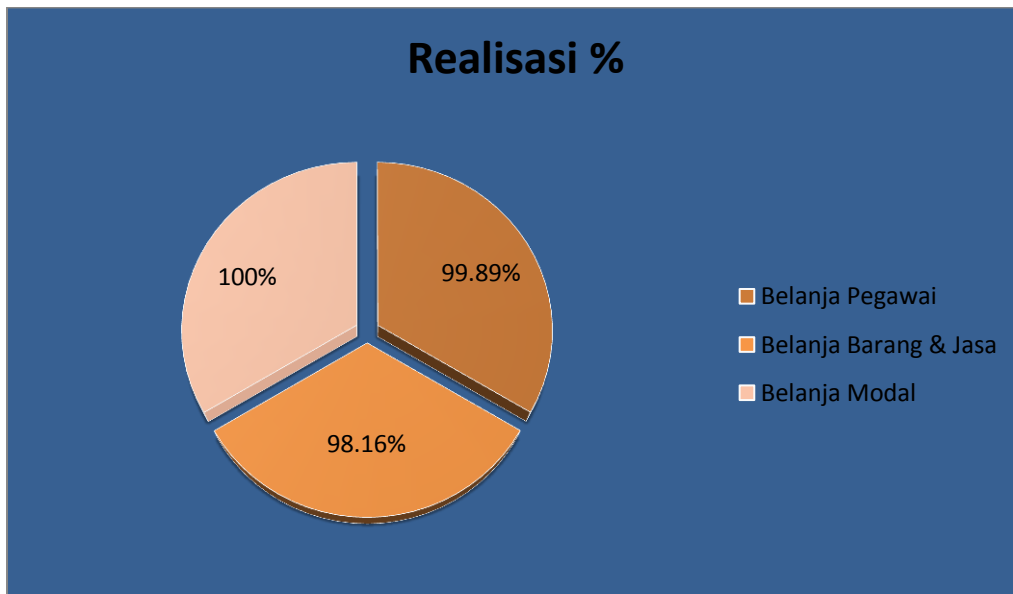
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	9,375,000	8,262,000	88.13	tidak rutinnya dilakukan rapat kantor sehingga mempengaruhi realisasi keuangan. Adapun rekening belanja yang tersisa yakni makan dan minum rapat Rp. 1.080.000 dan makan minum tamu Rp. 33.000	Rapat kantor akan dilakukan secara rutin sesuai situasi dan kondisi di tahun berikutnya mulai stabil dan covid - 19 sudah tidak mewabah
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	110,575,000	109,098,744	98.66	-	-
11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	162,000,000	162,000,000	100.00	-	-
12	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	86,990,800	86,883,200	99.88	-	-
II	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	107,350,250	107,090,500	99.76		
14	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,728,000	60,728,000	100.00	-	-
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	29,895,000	29,895,000	100.00	-	-
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	16,727,250	16,467,500	98.45	-	-
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,530,000	2,530,000	100.00		
17	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	2,530,000	2,530,000	100.00	-	-
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4,930,000	4,930,000	100.00		
18	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	2,510,000	2,510,000	100.00	-	-
19	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2,420,000	2,420,000	100.00	-	-
V	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	4,520,000	4,520,000	100.00		
20	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	4,520,000	4,520,000	100.00	-	-
VI	Program Pendidikan Politik Masyarakat	217,621,500	209,686,000	96.35		
21	Pemantauan, Pengawasan & Evaluasi Parpol, Ormas & LSM	17,942,500	17,077,000	95.18	-	-

22	Pemantauan Situasi Politik Daerah	18,481,000	18,410,000	99.62	-	-
23	Rencana Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik	11,038,000	8,349,000	75.64	belanja penggandaan yg dananya dipersiapkan u/menggandakan SPJ dana banpol dari 10 partai politik yg ada, tetapi dari 10 parpol tsb telah menggandakan masing2 SPJ nya sehingga belanja ini tidak terpakai, tersisa Rp. 1.491.000	akan disesuaikan dengan kebutuhan belanja penggandaan
24	Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Partai Politik dan Masyarakat	20,793,000	20,793,000	100.00	-	-
25	Pelaksanaan Desk Pemilihan Umum	149,367,000	145,057,000	97.11	-	-
VII	Program Pembinaan Kerukunan dan Kesatuan Bangsa	437,106,000	426,833,300	97.65		
26	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	11,054,000	9,794,000	88.60	realisasi keuangan tidak mencapai target dikarenakan masih ada sisa anggaran perjalanan dinas dalam daerah Rp. 70.000 dan luar daerah Rp. 1.190.000, yang masing - masing sisa dari belanja tersebut tidak bisa digunakan untuk 1 kali perjalanan.	-
27	Pendidikan Bela Negara	5,372,000	5,290,000	98.47	-	-
28	Forum Koordinasi Pengawasan Orang Asing serta Pemantauan Orang Asing, NGO & Lembaga Asing	12,754,000	12,684,000	99.45	-	-
29	Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama	88,524,000	88,168,400	99.60	-	-

30	Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	29,580,000	22,385,000	75.68	tidak terlaksananya pertemuan tersebut (fasilitasi pertemuan konflik sosial yang sifatnya disiapkan) sehingga mempengaruhi realisasi keuangan	dananya tetap dipersiapkan dan dilaksanakan di tahun depan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah
31	Penguatan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah	289,822,000	288,511,900	99.55	-	-

Sumber : Keuangan KesbangPol





Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Penyerapan anggaran untuk program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Luwu Timur pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.062.622.657,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.039.992.753,- atau sekitar 98,90%, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 825.055.378,- dan terealisasi sebesar Rp. 824.118.711 atau sekitar 99,89% dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 1.237.567.279,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.215.874.042,- atau sekitar 98,25% dan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 22.624.904,- atau 1,10%.

Penjelasan untuk program dan kegiatan dipaparkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 463.509.529,- dengan realisasi sebesar Rp. 460.284.242,- dengan persentase sebesar 99,30% termasuk berhasil. Dengan capaian fisik 100% maka terjadi efisiensi anggaran yang mengakibatkan adanya sisa anggaran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 107.350.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 107.090.500,- dengan persentase sebesar 99,76% termasuk berhasil. Dengan capaian fisik 100% maka terjadi efisiensi anggaran yang mengakibatkan adanya sisa anggaran.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 2.530,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.530,000,- dengan persentase sebesar 100% berhasil.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.930.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.930.000,- dengan persentase sebesar 100% berhasil. Dengan capaian fisik 100%.
5. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.520.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.520.000,- dengan persentase sebesar 100% berhasil. Dengan capaian fisik 100%.
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 217.621.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 209.686.000,- dengan persentase sebesar 96,35% termasuk berhasil.
7. Program Pembinaan Kerukunan dan Kesatuan Bangsa dengan anggaran sebesar Rp. 437.106.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 426.833.300,- dengan persentase sebesar 97,65% termasuk berhasil. Dengan capaian fisik 100% maka terjadi efisiensi anggaran yang mengakibatkan adanya sisa anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum memperlihatkan pencapaian kinerja yang optimal atas sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran, rata-rata tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Ini berarti terdapat peningkatan pencapaian target yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dilihat dari sisi pencapaian akuntabilitas keuangan dalam hal ini, tingkat realisasi keuangan tahun 2020 sebesar 98,90% atau lebih tinggi capaiannya dibanding tahun lalu yang realisasi keuangan mencapai 95,58%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap 3 (tiga) indikator yang dicantumkan dalam RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 khususnya Tahun Anggaran 2020, dapat dipenuhi sesuai harapan jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan kami jadikan motivasi lebih lanjut lagi di tahun – tahun mendatang.

Malili, 06 Januari 2021



**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Jumlah Surat keluar masuk yang diagendakan	350	362	103
		Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan	36	36	100
		Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	1	1	100
		Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	14	14	100
		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	40	40	100
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	3	100
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7	7	100
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	60	60	100
		Jumlah makan dan minum yang disediakan	510	302	59
		Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	30	27	90
		Jumlah tenaga pendukung administrasi / teknis yang terbayarkan	12	12	100
		Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	438	395	90
		Jumlah kendaraan dinas /operasional yang diadakan	0	0	0
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	12	12	100
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	1	100
		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	4	4	100

		Jumlah aparat mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1	1	100
		Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2	2	100
		Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	1	1	100
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat	9	9	100
2	Meningkatnya Politik Masyarakat	Jumlah SKT yang terbit	95	100	105
		Jumlah Laporan Pemantauan Situasi Politik Daerah	4	4	100
		Jumlah Laporan hasil verifikasi dana bantuan parpol	1	1	100
		Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	25	25	100
		Jumlah Tim Desk Pemilihan Umum	1	1	100
3	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Jumlah Laporan FPK	1	1	100
		Jumlah Peserta yang mengikuti pendidikan bela negara / pengukuhan dan rapat kerja forum bela negara	0	0	0
		Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing	4	4	100
		Jumlah Laporan FKUB	2	2	100
		Jumlah laporan konflik sosial	4	4	100
		Jumlah Tim Kewaspadaan Dini Daerah yang terbentuk	3	3	100
		Jumlah peserta yang mengikuti gerakan nasional revolusi mental	0	0	0

Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 2.062.622.657,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 2.039.992.753,-

**ANALISIS CAPAIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran : 2020

INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Surat keluar masuk yang diagendakan	350	362	103
Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan	36	36	100
Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	1	1	100
Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	14	14	100
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	40	40	100
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	3	100
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7	7	100
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	60	60	100
Jumlah makan dan minum yang disediakan	510	302	59
Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	30	27	90
Jumlah tenaga pendukung administrasi / teknis yang terbayarkan	12	12	100
Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	438	395	90
Jumlah kendaraan dinas /operasional yang diadakan	0	0	0
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	12	12	100
Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	1	100
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	4	4	100
Jumlah aparat mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1	1	100
Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2	2	100
Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	1	1	100
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat	9	9	100
Jumlah SKT yang terbit	95	100	105
Jumlah Laporan Pemantauan Situasi Politik Daerah	4	4	100
Jumlah Laporan hasil verifikasi dana bantuan parpol	1	1	100
Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	25	25	100

Jumlah Tim Desk Pemilihan Umum	1	1	100
Jumlah Laporan FPK	1	1	100
Jumlah Peserta yang mengikuti pendidikan bela negara / pengukuhan dan rapat kerja forum bela negara	0	0	0
Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing	4	4	100
Jumlah Laporan FKUB	2	2	100
Jumlah laporan konflik sosial	4	4	100
Jumlah Tim Kewaspadaan Dini Daerah yang terbentuk	3	3	100
Jumlah peserta yang mengikuti gerakan nasional revolusi mental	0	0	0

**PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN (PKK)
TAHUN ANGGARAN 2020
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Program	Indikator Kegiatan						Capaian	Ket
		Uraian	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input	Dana	Rp	1,440,000	1,440,000	100.00	
			Output	Jumlah Surat keluar masuk yang diagendakan	Buah	350	362	103.43	
			Outcome	Terwujudnya penyediaan jasa surat menyurat	%	100	100	100.00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Input	Dana	Rp	28,005,000	27,819,250	99.34	
			Output	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan	Rek	36	36	100.00	
			Outcome	Terwujudnya kelancaran jasa komunikasi, air dan listrik	%	100	100	100.00	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input	Dana	Rp	28,005,000	27,819,250	99.34	
			Output	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	Org	1	1	100.00	
			Outcome	Terciptanya kondisi kantor yg bersih, indah & nyaman	%	100	100	100.00	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input	Dana	Rp	9,800,000	9,780,000	99.80	
			Output	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	Unit	14	14	100.00	
			Outcome	Terciptanya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100.00	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input	Dana	Rp	14,065,479	14,060,048	99.96	
			Output	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	40	40	100.00	
			Outcome	Terpenuhinya alat tulis kantor	%	100	100	100.00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input	Dana	Rp	14,718,000	14,479,700	98.38	
			Output	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	3	3	100.00	
			Outcome	Terpenuhinya barang cetakan penggandaan	%	100	100	100.00	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input	Dana	Rp	2,845,250	2,828,800	99.42	
			Output	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	7	7	100.00	
			Outcome	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan penerangan untuk kelancaran operasional	%	100	100	100.00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input	Dana	Rp	6,180,000	6,120,000	99.03	
			Output	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Exp	60	60	100.00	
			Outcome	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang - undangan	%	100	100	100.00	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Input	Dana	Rp	9,375,000	8,262,000	88.13	
			Output	Jumlah makan dan minum yang disediakan	Dos	510	302	59.22	
			Outcome	Tersedianya makan dan minum	%	100	100	100.00	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Input	Dana	Rp	110,575,000	109,098,744	98.66	
			Output	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	Kali	30	27	90.00	
			Outcome	Meningkatnya pelayanan kedinasan	%	100	100	100.00	
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Tekhnis	Input	Dana	Rp	162,000,000	162,000,000	100.00	
			Output	Jumlah tenaga pendukung administrasi / tekhnis yang terbayarkan	Org	12	12	100.00	
			Outcome	Terciptanya keamanan dan kelancaran administrasi kantor	%	100	100	100.00	
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Input	Dana	Rp	86,990,800	86,883,200	99.88	
			Output	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	kali	438	395	90.18	
			Outcome	Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah terkait tupoksi dinas	%	100	100	100.00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Input	Dana	Rp	-	0	0.00	
			Output	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang diadakan	Unit	1	0	0.00	
			Outcome	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	Unit	1	0	0.00	

		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Alat Kantor	Input	Dana	Rp	60,728,000	60,728,000	100.00	
			Output	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Unit	12	12	100.00	
			Outcome	Terwujudnya pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	100	100.00	
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Input	Dana	Rp	29,895,000	29,895,000	100.00	
			Output	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	1	1	100.00	
			Outcome	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	1	100.00	
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Input	Dana	Rp	16,727,250	16,467,500	98.45	
			Output	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Unit	4	4	100.00	
			Outcome	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	%	100	100	100.00	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input	Dana	Rp	2,530,000	2,530,000	100.00	
			Output	Jumlah aparat mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Org	1	1	100.00	
			Outcome	Tersedianya aparatur yang berkualitas	Org	1	1	100.00	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Input	Dana	Rp	2,510,000	2,510,000	100.00	
			Output	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Dok	2	2	100.00	
			Outcome	Terlaksananya penyusunan laporan semesteran dan akhir tahun	%	100	100	100.00	
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Input	Dana	Rp	2,420,000	2,420,000	100.00	
			Output	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	Dok	1	1	100.00	
			Outcome	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	%	100	100	100.00	
5	Program Perencanaan dan Penganggaran	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Input	Dana	Rp	4,520,000	4,520,000	100.00	
			Output	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat	dok	9	9	100.00	
			Outcome	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan & penganggaran SKPD	%	100	100	100.00	

6	Pendidikan Politik Masyarakat	Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Parpol, Ormas, LSM dan OKP	Input	Dana	Rp	17,942,500	17,077,000	95.18	
			Output	Jumlah SKT yang terbit	Unit	95	100	105.26	
			Outcome	Terlaksananya pemantauan, pengawasan dan evaluasi Ormas dan LSM	%	95	95	100.00	
		Pemantauan Situasi Politik Daerah	Input	Dana	Rp	18,481,000	18,410,000	99.62	
			Output	Jumlah Laporan Pemantauan Situasi Politik Daerah	Dok	4	4	100.00	
			Outcome	Terlaksananya pemantau situasi politik daerah	%	95	95	100.00	
		Rencana Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Input	Dana	Rp	11,038,000	8,349,000	75.64	
			Output	Jumlah Laporan hasil verifikasi dana bantuan parpol	Dok	1	1	100.00	
			Outcome	Meningkatnya pelaporan keuangan parpol yang tepat waktu	%	95	95	100.00	
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Partai Politik dan Masyarakat	Input	Dana	Rp	20,793,000	20,793,000	100.00	
			Output	Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	25	25	100.00	
			Outcome	Meningkatnya kapasitas SDM pengurus parpol dan masyarakat	%	95	95	100.00	
		Pelaksanaan Desk Pemilihan Umum	Input	Dana	Rp	149,367,000	145,057,000	97.11	
			Output	Jumlah Tim Desk Pemilihan Umum	Tim	1	1	100.00	
			Outcome	Terlaksananya fasilitasi desk pemilihan umum	%	95	95	100.00	
7	Program Pembinaan Kerukunan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Input	Dana	Rp	11,054,000	9,794,000	88.60	
			Output	Jumlah Laporan FPK	Lap	1	1	100.00	
			Outcome	Tersedianya laporan dokumen FPK	%	95	95	100.00	
		Pendidikan Bela Negara	Input	Dana	Rp	5,372,000	5,290,000	98.47	
			Output	Jumlah Peserta yang mengikuti pendidikan bela negara / pengukuhan dan rapat kerja forum bela negara	Orang	-	0	0.00	
			Outcome	Terlaksananya pendidikan bela negara	%	-	0	0.00	

		Forum Koordinasi Pengawasan Orang Asing serta Pemantauan orang Asing, NGO dan lembaga Asing	Input	Dana	Rp	12,754,000	12,684,000	99.45	
			Output	Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing	Lap	4	4	100.00	
			Outcome	Terlaksananya pemantauan orang asing	%	95	95	100.00	
		Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama	Input	Dana	Rp	88,524,000	88,168,400	99.60	
			Output	Jumlah Laporan FKUB	dok	2	2	100.00	
			Outcome	Terlaksananya fasilitasi forum kerukunan umat beragama	%	95	95	100.00	
		Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Input	Dana	Rp	29,580,000	22,385,000	75.68	
			Output	Jumlah laporan konflik sosial	dok	4	4	100.00	
			Outcome	Terlaksananya fasilitasi tim terpadu penanganan konflik sosial	%	95	95	100.00	
		Penguatan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah	Input	Dana	Rp	289,822,000	288,511,900	99.55	
			Output	Jumlah Tim Kewaspadaan Dini Daerah yang terbentuk	Tim	3	3	100.00	
			Outcome	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	95	95	100.00	
		Gerakan Nasional Revolusi Mental	Input	Dana	Rp	-	-	0.00	
			Output	Jumlah peserta yang mengikuti gerakan nasional revolusi mental	Orang	-	0	0.00	
			Outcome	Meningkatnya pengetahuan aparat desa dan masyarakat tentang revolusi mental	%	-	0	0.00	